



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2484>
<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

PERAN STAKEHOLDER DALAM PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID 19 PADA PROGRAM PUSPA AMAN DI KABUPATEN GIANYAR

Hasan Ismail

Jurusan Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

hasanismail@untag-sby.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 30 September 2022

Revised date: 01 Oktober 2022

Accepted date: 03 November 2022

ABSTRACT

The purpose of this research is analyze the importance and involvement of stakeholders in the implementation of the Puspa Aman Program. The Covid-19 pandemic has caused changes in the pattern of human interaction this has caused disrupted the economic sector resulting in the loss of livelihoods so that the economic recession caused by the Covid 19 Pandemic is unavoidable. Bali is one of the provinces with economic growth that has slumped due to the Covid 19 Pandemic. The Central Bureau of National Statistics in 2020 noted that the economic growth of the Bali Province contracted by -9.31% Y on Y. The Highest Unemployment Rate in Bali Province in 2020, Gianyar Regency by 7.53%, second out of ten regencies in the province of Bali. The efforts of the Gianyar Regency government in economic recovery after the COVID-19 pandemic, especially in the food security sector, namely by realizing the Puspa Aman Program (a natural, independent, safe and comfortable food center). This study uses a descriptive, a qualitative approach, by connecting and describing phenomena that become the research topic through interviews, document reviews, and literature studies. This study shows that 70% of the total 65 villages, 45 villages in Gianyar district, have implemented the Puspa Aman Program realization. The Safe Puspa Realization Program has 3 (three) Stakeholders involved, namely Government elements, Community elements, and Private elements (Business). All have a connection in realizing the Program. However, in the realization of the Puspa Aman program there has been no involvement of academic elements.

Keywords: Covid 19, Food Security, Stakeholders, Economic Recovery

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan Program Puspa Aman di Kabupaten Gianyar. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan pada pola

interaksi manusia, hal ini menyebabkan disrupsi pada sektor ekonomi mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencarian sehingga resesi ekonomi diakibatkan Pandemi Covid 19 tidak dapat dihindarkan. Bali merupakan salah satu Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang terpuruk akibat Pandemi Covid 19. Badan Pusat Statistik Nasional pada 2020 mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali Kontraksi mencapai -9,31% Y-on-Y. Adapun tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Bali pada tahun 2020, Kabupaten Gianyar sebesar 7,53% menempati urutan ke dua dari sepuluh Kabupaten di Provinsi Bali. Upaya pemerintah Kabupaten Gianyar dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19, khususnya disektor ketahanan pangan yakni dengan merealisasikan Program Puspa Aman (pusat pangan alami, mandiri, aman dan nyaman). Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif, Deskriptif dengan menghubungkan peristiwa dan menggambarkan fenomena kunci yang menjadi topik penelitian melalui, observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan realisasi Program Puspa Aman sudah terlaksana 70% dari total 65 Desa yakni 45 Desa di kabupaten Gianyar. dalam realisasi program Puspa Aman terdapat 3 (tiga) unsur Stakeholder yang terlibat yakni unsur Pemerintah (Government), unsur Masyarakat (Community) dan unsur Swasta (Busniss), Seluruh Unsur tersebut memiliki keterkaitan dalam merealisasikan Program. Namun dalam realisasi program Puspa Aman belum ada keterlibatan unsur akademisi.

Kata Kunci: Covid 19, Ketahanan Pangan, Stakeholder, Pemulihan Ekonomi

2022 UPNVJT. All rights reserved

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah secara dramatis mengubah lanskap sosial ekonomi global dan mengubah arah ekonomi global menuju resesi. Dampak Covid-19 yang paling terasa adalah pada aktivitas perekonomian dimana kebutuhan sehari-hari masyarakat perlu dilakukan. Aktivitas ekonomi yang dimaksud adalah kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan/atau jasa (Puspaningtyas, 2021).

Penyebaran dan penularan Covid 19 yang sangat cepat menimbulkan korban jiwa, serta upaya mitigasinya yang unprecedented menciptakan perubahan besar pada interaksi di tingkat individu hingga pada tingkatan pemerintahan. Pembatasan interaksi yang masif membawa konsekuensi logis pada perekonomian, seperti produktivitas dan permintaan yang turun (D. R. Nugroho et al., 2020). Selain itu tentu saja kebijakan seperti lockdown, physical distancing, dan larangan bepergian yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi secara

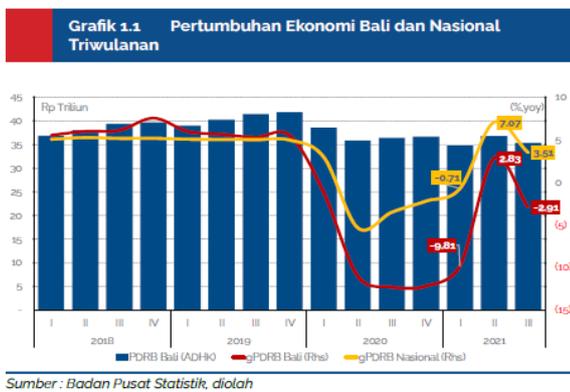
signifikan akan berdampak besar, menghasilkan implikasi terhadap ketahanan pangan masyarakat (Badan Ketahanan Pangan, 2020).

World Health Organization (WHO) telah resmi mengumumkan Coronavirus Disease 2019 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Pandemi Covid-19 memang sebuah kejadian luar biasa, virus tersebut telah tersebar dengan pesat setidaknya di 21 negara pada 2020 termasuk Indonesia. Puncak peningkatan kasus covid 19 di Indonesia terjadi pada bulan Juni 2021 jumlah kasus mingguan mencapai 125.396 (<https://www.cnbcindonesia.com/news>, 2021). Penyebaran virus Covid 19 terjadi begitu cepat, hampir diseluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan kasus, kondisi yang begitu extraordinary menuntut pemerintah segera mengambil langkah-langkah darurat, pilihan pemerintah hanya terbatas pada penyelamatan nyawa masyarakat atau penyelamatan ekonomi, tentu ini bukan kondisi yang ideal untuk menentukan

sebuah kebijakan namun kondisi dan situasi yang ada mengharuskan pemerintah mengambil keputusan yang cepat dan tepat, berdasar pada situasi tersebut pemerintah melakukan beberapa kebijakan pencegahan penyebaran Covid 19 yang tidak dapat dihindari seperti PPKM, physical distancing, travel ban/restriction dan pembatasan aktivitas dalam kegiatan produksi.

Konsekuensi logis dari kebijakan tersebut membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal penyebaran Covid-19 tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen (y-on-y) dibandingkan tahun 2019, namun pada triwulan 1 tahun 2021 ekonomi Indonesia mulai mengalami perbaikan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi -0,75 (y-on-y) dibandingkan tahun 2020. Penurunan ekonomi yang terjadi diakibatkan terhambatnya perputaran ekonomi, proses produksi dan juga distribusi barang dan jasa di masyarakat, hal ini mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai respon dari pengusaha untuk menjaga efisiensi pengeluaran perusahaan sebagai dampak dari kebijakan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang pertumbuhannya mengalami kontraksi cukup besar akibat dampak covid-19 (Kristina, 2020). Hal ini bisa dilihat dari data pada grafik berikut:

Gambar: Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional



Badan pusat statistik nasional mencatat perekonomian Bali pada triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi -12 persen hingga -13,5 persen, pada triwulan III dan triwulan IV masih stagnan di angka tersebut. Hal ini lebih dalam dari kontraksi nasional pada triwulan II tahun 2020 yang terkontraksi -5,5 persen dan mengalami perbaikan di

triwulan III dan triwulan IV kontraksi sebesar -3,2 persen dan -1,5 persen. Namun pada triwulan I dan triwulan II tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mulai membaik, tercatat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali mengalami peningkatan di triwulan I menjadi -9,81 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional meningkat ke angka -0,71 persen, dan pada triwulan II pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali naik menjadi 2,03 persen, hal ini juga diikuti kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 7,07 persen. Namun pada triwulan III terjadinya puncak pandemi covid 19 pada bulan juni mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali mengalami kontraksi -2,91 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan menjadi 3,51 persen.

Laporan perekonomian Provinsi Bali pada bulan november tahun 2021 yang dipublikasikan Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah Bali, penurunan kinerja perekonomian Bali pada 2020 sampai 2021 diakibatkan melemahnya konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, ekspor luar negeri, perlambatan konsumsi rumah tangga dan pemerintah sejalan dengan kebijakan pembatasan pergerakan dalam menghadapi peningkatan kasus Covid-19. Sementara itu, melembatnya kinerja ekspor luar negeri sebagai dampak dari belum pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara. Dari sisi kinerja lapangan usaha Provinsi Bali mengalami kontraksi, dari laporan perekonomian Provinsi Bali yang dikeluarkan kantor perwakilan Bank Indonesia wilayah Bali, tercatat kontraksi lapangan usaha pada triwulan III 2021, kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan-minuman (-16,13%), lapangan usaha pertanian turun (-15,92%), lapangan usaha perdagangan (-9,39%) lapangan usaha transportasi (-5,28%), dan lapangan usaha industri pengolahan (-6,45%), kontraksi ini disebabkan oleh PPKM Darurat dan PPKM level 4 yang telah membatasi jam operasional dan kapasitas layanan restoran dan pusat komersial serta persyaratan persyaratan penerbangan/penyeberangan di bandara dan pelabuhan. Di sisi lain, kinerja industri manufaktur masih lesu akibat turunnya permintaan produk industri akibat penurunan wisatawan. Perkembangan sektor pertanian menurun pada triwulan III tahun 2021 karena kematian ternak (babi) akibat virus ASF (African swine fever).

Di tengah kondisi ekonomi dunia yang fluktuatif akibat pandemi covid 19 pemerintah

diharapkan mampu membuat terobosan dengan tujuan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19, tentu ini tantangan yang tidak mudah oleh sebab itu pemerintah daerah memiliki peran yang penting berdasarkan pendekatan desentralisasi fungsi, serta dukungan fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah (Mariana, 2010). Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai lembaga terdepan dalam pemulihan ekonomi didaerahnya (Hijri et al., 2021). Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 cukup dalam yakni sebesar -8,40 persen (Paristha et al., 2022). Kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi berdampak pada peningkatan angka pengangguran. Data badan pusat statistik tahun 2020 menunjukkan angka pengangguran di Kabupaten Gianyar menempati urutan ke dua yakni tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,53 persen.

Jenis Kelamin	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)		
	2018	2019	2020
Laki-laki	2,27	1,54	8,70
Perempuan	0,85	1,27	6,09
Jumlah	1,60	1,42	7,53
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.			
Hasil Sakernas			

Sumber: <https://gianyarkab.bps.go.id>

Data diatas menunjukan bahwa pengangguran terbuka di kabupaten Gianyar sebesar 7,53% hal ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 1,42% dan tahun 2018 sebesar 1,60%. Angka pengangguran di kabupaten Gianyar terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebesar 8,70 persen dan Perempuan sebesar 6,09 persen. Berkaitan dengan pemulihan ekonomi, Kabupaten Gianyar telah melakukan beberapa upaya salah satunya dengan pelaksanaan program ketahanan pangan melalui program Puspa Aman (pusat pangan alami, mandiri, aman dan nyaman). Berkaitan dengan angka pengangguran yang meningkat akibat pandemi covid 19, salah satu tujuan program Puspa Aman yakni meningkatkan padat karya guna mengurangi angka pengangguran dan terutama dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat dan peningkatan daya konsumsi rumah tangga. Dalam hal realisasi kebijakan atau program keterlibatan stakeholder merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan,

oleh karena itu analisis stakeholder merupakan salah satu cara untuk mempermudah pemahaman kita dalam memperoleh pemahaman atas suatu kebijakan serta untuk mengidentifikasi keterlibatan dan menilai peran stakeholder dalam kebijakan (Febriandini et al., 2019).

Istilah stakeholder dalam literatur memiliki banyak definisi, namun dapat diambil benang merahnya bahwa stakeholder merupakan pemangku kepentingan (Paristha et al., 2022) sedangkan pemangku kepentingan adalah individu dan kelompok yang memiliki klaim atau kepentingan (Saputri, 2019). Penelitian yang dilakukan (Krisnadi, 2012) menunjukkan bahwa stakeholders kunci dalam pelaksanaan program ini mencakup Tim Pangan Desa, Lembaga Keuangan Desa, Kelompok Afinitas, Pengurus Lumbung Pangan, dan pihak Swasta, akan tetapi keterlibatan pihak swasta dirasakan masih kurang. Berkaitan dengan kesimpulan tersebut peneliti akan mengkaji keterlibatan dan peran swasta dalam realisasi program Puspa Aman di Kabupaten Gianyar. Penelitian dilakukan (Mustafa & Marsoyo, 2020) Hasil penelitian bahwa terdapat 5 (lima) tipologi peran stakeholder yaitu peran stakeholder sebagai pembuat kebijakan, perencana, fasilitator, pelaksana, dan peneliti. Berkaitan dengan kesimpulan tersebut peneliti akan melihat peran stakeholder sebagai *Policy Creator*, Koordinator, Fasilitator, Implementor dan Akselerator (R. Nugroho, 2017). Selain itu penelitian dilakukan (Rakhmadany et al., 2020) hasil penelitian menunjukan bahwa Analisis stakeholder sebagai alat yang efektif bagi tim perencana program untuk mengidentifikasi dan memetakan kepentingan serta pengaruh masing-masing stakeholder sebelum mendesain sebuah program. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut memberikan rekomendasi dalam perencanaan dan pelaksanaan sebuah program dibutuhkan analisis stakeholder dalam menentukan aktor yang terlibat dalam program, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi minat, kepentingan, dan pengaruh para stakeholder terhadap program, sehingga dalam penentuan stakeholder yang terlibat dengan tepat. berdasarkan rekomendasi tersebut peneliti bertujuan untuk melihat stakeholder yang terlibat dan peran stakeholder dalam pelaksanaan Program Puspa Aman di Kabupaten Gianyar.

Berkaitan dengan upaya pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan di Kabupaten Gianyar pasca

pandemi covid 19, peneliti bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder untuk melihat siapa saja stakeholder yang terlibat dan peran stakeholder dalam mencapai tujuan program Puspa Aman di Kabupaten Gianyar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan Kualitatif (Neuman, 2011) dimana peneliti mempelajari dan menggali fenomena dan kegiatan tertentu (program, peristiwa, proses, lembaga atau kelompok sosial) dan mengumpulkan informasi yang terperinci menggunakan berbagai metode pengumpulan data selama periode waktu tertentu (Creswell, 2013). Jenis penelitian ini deskriptif yang akan menggali dan mendeskripsikan stakeholder yang terlibat serta peran stakeholder pada program Puspa Aman di Kabupaten Gianyar. Informan pada penelitian ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan Penggerak Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Gianyar, Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi literatur. Proses analisis dilakukan melalui tahap indentifikasi data, reduksi data, abstraksi data, interpretasi data dan pengecekan keabsahan data (Creswell, 2013). Hasil analisis tersebut kemudian di deskripsikan berdasarkan proposisi teoritis sesuai teori yang digunakan (K.Yin, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Puspa Aman merupakan program ketahanan pangan yang berbasis pada ketahanan pangan rumah tangga di Kabupaten Gianyar. Program ini berdasarkan Surat Edaran yang diterbitkan Bupati Gianyar nomor: 521/23813/Sekret/2018 tentang pelaksanaan Program Puspa Aman (Pusat Pangan Alami Mandiri Asri dan Nyaman) Program ini diterbitkan pada 28 desember 2018 yang ditujukan kepada seluruh kepala Desa di Kabupaten Gianyar, namun dalam pelaksanaannya kurang optimal dan terhambat karena Pandemi Covid 19 pada awal tahun 2020. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gianyar “Program Puspa Aman ini sudah ada sejak awal tahun 2019 namun dalam pelaksanaannya terhambat pandemi covid 19,... seperti yang mas ketahui bahwa pada awal pandemi covid 19 banyak hal yang perlu disesuaikan termasuk refocusing anggaran dan program ke pencegahan dan penyebaran Virus

Corona” (Ny.Dewi Dinas Ketahanan Pangan). Dengan adanya refocusing anggaran dan program, implikasinya banyak program pemerintah yang terhambat, salah satunya program Puspa Aman yang seharusnya sudah dilaksanakan pada tahun 2019. Dengan adanya refocusing sehingga realisasi program Puspa Aman baru bisa di laksanakan pada akhir 2020.

Pelaksanaan program Puspa Aman merupakan salah satu game changer pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19 di kabupaten Gianyar. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1829 / E-14 / HK / 2021 tentang Penetapan petunjuk teknis penggunaan dana desa tahun 2022, pada sub pemulihan ekonomi yang merujuk pada peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, point ke 2 tentang ketahanan pangan yang mewajibkan Desa menganggarkan minimal 20% untuk ketahanan pangan, salah satunya penggunaan 20% dana Desa untuk pelaksanaan program Puspa Aman yang memanfaatkan wilayah pekarangan secara optimal untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pangan bagi keluarga. Dengan ditempatkannya anggaran 20% dari APBDes pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan ketahanan pangan yang mandiri antara lain tersediannya Rumah bibit, Rumah pupuk, Pengolahan dan Distribusi disetiap desa dikabupaten Gianyar. Adapun tanaman atau produk pertanian yang menjadi fokus pelaksanaan program Puspa Aman yaitu tanaman yang berhubungan dengan kebutuhan keluarga seperti cabe, terong, sayur-sayuran, dan bumbu-bumbu dapur lainnya.

Sejak direalisasikan Program Puspa Aman pada bulan desember 2020 hingga juli 2022 program Puspa Aman telah terealisasi sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Pelaksanaan Program	Kategori Mandiri	Kategori Telaksana	Belum Terlaksana
1	Gianyar	12 Desa	7 Desa	6	1	5
2	Blahbatuh	9 Desa	8 Desa	6	2	1
3	Sukawati	12 Desa	8 Desa	6	2	4
4	Ubud	8 Desa	4 Desa	3	1	4
5	Payangan	9 Desa	6 Desa	5	1	3
6	Tangallalang	7 Desa	5 Desa	4	1	2
7	Tampaksiring	8 Desa	7 Desa	5	2	1
Jumlah		65 Desa	45 Desa	35 Desa	10 Desa	20 Desa

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Gianyar

Diketahui terdapat 7 kecamatan dan 65 desa di kabupaten Gianyar, Terdapat 45 desa yang sudah merealisasikan program Puspa Aman dan 20 desa masih tahap sosialisasi dan pendampingan, dari 45 desa terdapat 35 desa yang sudah mandiri dan 10 desa masih dalam pendampingan menuju mandiri. dari data tersebut terlihat program Puspa Aman sudah direalisasikan disebagian desa, tentu dengan kerumitan-kerumitan yang ada disetiap desa berbeda-beda, untuk mencapai ketahanan pangan yang mandiri diperlukan keterlibatan dari berbagai stakeholder. Identifikasi stakeholder diperlukan untuk melihat siapa saja stakeholder yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan (Listyo et al., 2018). Untuk melihat peran stakeholder dapat diklasifikasikan antara lain; Policy Creator, Koordinator, Fasilitator Implementor dan Akselerator (R. Nugroho, 2017).

Identifikasi stakeholder

Identifikasi stakeholders dalam pelaksanaan Program Puspa Aman berasal dari unsur instansi pemerintahan (government), masyarakat (community) dan swasta (business). Dimana ketiga unsur tersebut mempunyai peran dan fungsi serta memiliki pengaruh yang tidak sama dalam

pelaksanaan program Puspa Aman di Kabupaten Gianyar.

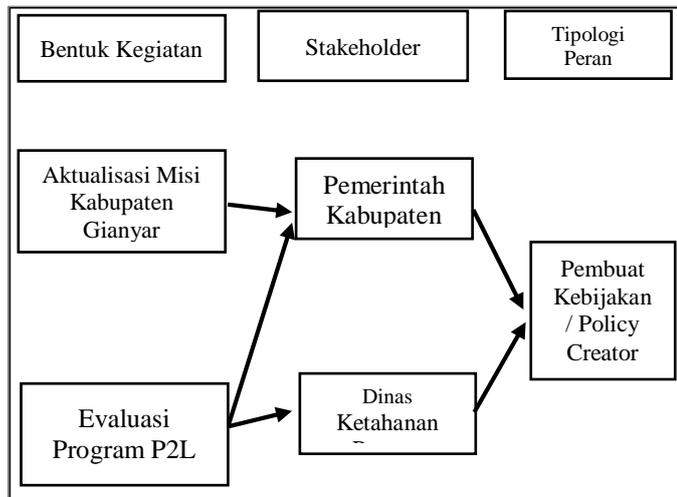
No	Unsur	Instansi / Stakeholder
1	Pemerintah (Government)	1. Pemerintah Provinsi Bali 2. Pemerintah Kabupaten Gianyar 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gianyar 4. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gianyar 5. Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Penggerak PKK Kabupaten Gianyar 8. Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Gianyar 9. Pemerintah Desa se-Kabupaten Gianyar
2	Masyarakat (Community)	Masyarakat Desa adat Kelompok Wanita Tani Penggerak PKK Desa Tokoh Masyarakat
3	Swasta (Business)	Bank BPD Bali Cabang Gianyar PLN Jawa-Bali PT.Prodin

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Dari tabel diatas jumlah *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan Program Puspa Aman di Kabupaten Gianyar sebanyak 16 (enam belas) *stakeholder*. diketahui dari unsur pemerintah terdapat 5 (lima) Instansi/Dinas, 1 (satu) Penggerak PKK Kabupaten dan 1 (satu) lembaga pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa di Kabupaten Gianyar. dari unsur masyarakat terdapat 4 (empat) kelompok *stakeholder*. sedangkan dari unsur swasta terdapat 1 (satu) perusahaan BUMD, 1 (satu) perusahaan BUMN dan 1 (satu) Perusahaan Swasta. dalam pelaksanaan program Puspa Aman setiap *stakeholder* memiliki peran yang tidak sama satu sama yang lain, hal ini dapat diklasifikasikan antara lain sebagai; *Policy Creator*, *Koordinator*, *Fasilitator*, *Implementor* dan *Akselerator* (R. Nugroho, 2017).

1. Policy Creator

Peran stakeholder dalam pembuatan kebijakan Puspa Aman dapat di gambarkan sebagai berikut;
Peran Stakeholder sebagai Pembuat kebijakan (Policy Creator)



Sumber: Hasil Olahan Penulis.

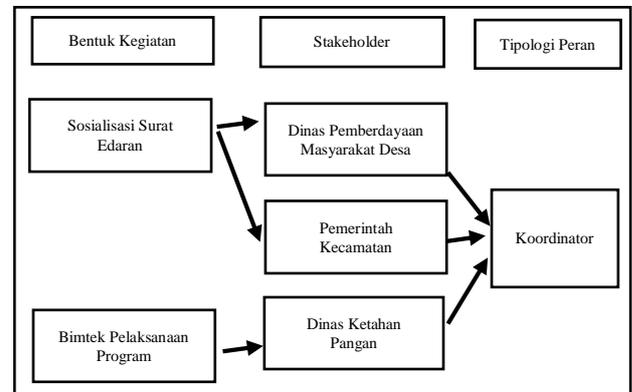
Terdapat 2 (dua) *stakeholder* yang terlibat dalam pembuat kebijakan (*Policy Creator*), yaitu pemerintah kabupaten Gianyar dan dinas ketahanan pangan Kabupaten Gianyar. *Policy creator* yaitu *stakeholders* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan (R. Nugroho, 2017). Keterlibatan pemerintah kabupaten Gianyar sebagai pembuat kebijakan ditunjukkan dalam perumusan program dari aktualisasi misi pemerintahan kabupaten Gianyar yakni “Membangun pertanian yang produktif, efisien, mandiri dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berwawasan lingkungan”. Adapun keterlibatan dinas Ketahanan Pangan ditunjukkan dari hasil evaluasi program pangan pekarangan lestari (P2L) dari hasil evaluasi tersebut diketahui bahwa dalam pelaksanaannya kurang berjalan optimal dan mengalami hambatan dari sisi keterlibatan *stakeholder* lain yang minim dan juga alokasi anggaran yang tidak konsisten. Dengan dasar itu pula pemerintah kabupaten Gianyar menerbitkan Surat Edaran nomor: 521/23813/Sekret/2018 tentang pelaksanaan Program Puspa Aman dan untuk memperkuat pelaksanaan Program Puspa Aman, pemerintah kabupaten Gianyar menerbitkan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1829 / E-14 / HK / 2021 tentang penetapan petunjuk teknis penggunaan dana desa tahun 2022, yang mewajibkan desa menganggarkan minimal 20% untuk ketahanan

pangan salah satunya penggunaan dana desa dalam pelaksanaan program Puspa Aman.

2. Koordinator

Pelaksanaan program Puspa Aman di kabupaten Gianyar peran Koordinator dapat di gambarkan sebagai berikut:

Peran *Stakeholder* sebagai Koordinator



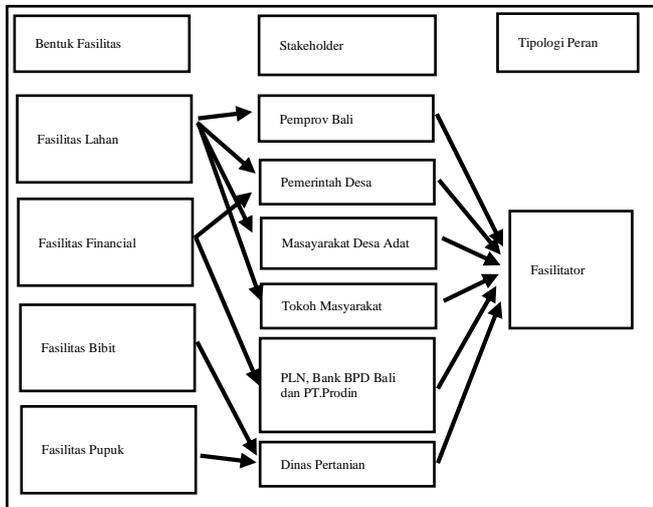
Sumber: Hasil Olahan Penulis.

Peran koordinator dalam pelaksanaan program Puspa Aman di kabupaten Gianyar, terdapat 3 (tiga) *stakeholders* yang mengkoordinasikan program yakni Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Kecamatan. Koordinator yakni *stakeholders* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholders* lain yang terlibat (R. Nugroho, 2017). Peran sosialisasi Surat Edaran nomor: 521/23813/Sekret/2018 tentang pelaksanaan Program Puspa Aman dan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1829 / E-14 / HK / 2021 tentang Penetapan petunjuk teknis penggunaan dana Desa tahun 2022, yang mewajibkan desa menganggarkan minimal 20% untuk ketahanan pangan ke seluruh kepala desa di kabupaten Gianyar dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan dinas pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan bimbingan teknis (BIMTEK) realisasi program Puspa Aman dan penganggaran 20% APBDes untuk ketahanan pangan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di kabupaten Gianyar dilakukan oleh pemerintah kecamatan, dinas pemberdayaan masyarakat desa dan dinas ketahanan pangan. Dinas pemberdayaan masyarakat berperan mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan BIMTEK, peran pemerintah kecamatan menginformasikan kegiatan BIMTEK ke pemerintah desa dan menyampaikan bimbingan teknis pengelolaan APBDes dalam realisasi program Puspa Aman, sedangkan peran Dinas ketahanan pangan

memberikan bimbingan teknis realisasi program Puspa Aman.

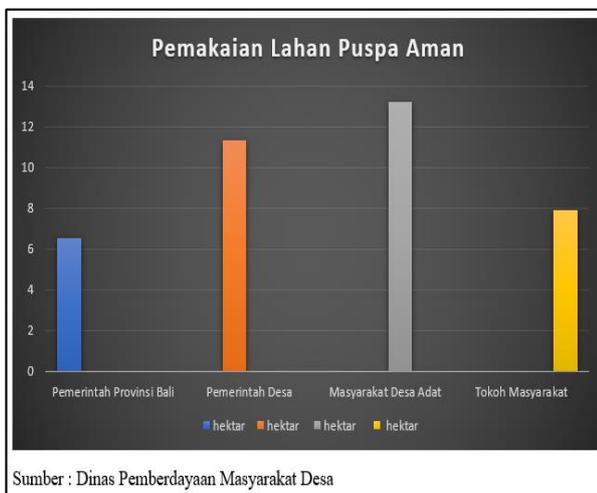
3. Fasilitator

Stakeholder yang berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan program Puspa Aman dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Hasil Olahan Penulis.

Terdapat 8 (delapan) *stakeholder* memiliki berperan sebagai fasilitator dalam realisasi program Puspa Aman di Kabupaten Gianyar. Fasilitator yaitu *stakeholders* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran (R. Nugroho, 2008). Penyediaan fasilitas lahan diperankan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa, masyarakat Desa adat dan Tokoh masyarakat. hal ini bisa dilihat dari data sebagai berikut:



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

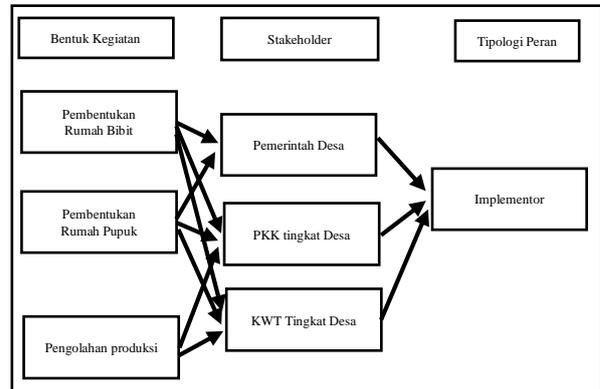
Diketahui pemerintah Provinsi Bali memberikan fasilitas lahan 6 hektar, pemerintah Desa 11 hektar, Masyarakat Desa Adat 13 hektar dan

Tokoh Masyarakat 8 hektar dalam realisasi program Puspa Aman. Adapun peran *stakeholder* dalam pemberian fasilitas financial yakni perusahaan PLN, Bank BPD Bali Cabang Gianyar dan PT.Prodin dalam penyaluran *Corporate social responsibility* (CSR) serta pemerintah Desa dengan pengalokasian APBdes. Adapun fasilitas bibit dan pupuk diperankan oleh Dinas Pertanian kabupaten Gianyar dalam bentuk bantuan langsung, pelatihan dan pendampingan pembentukan rumah bibit dan rumah pupuk dalam realisasi program Puspa Aman.

4. Implementor

Pelaksanaan program Puspa Aman di kabupaten Gianyar peran Implementor dapat di gambarkan sebagai berikut:

Peran *Stakeholder* sebagai Implementor



Sumber: Hasil Olahan Penulis.

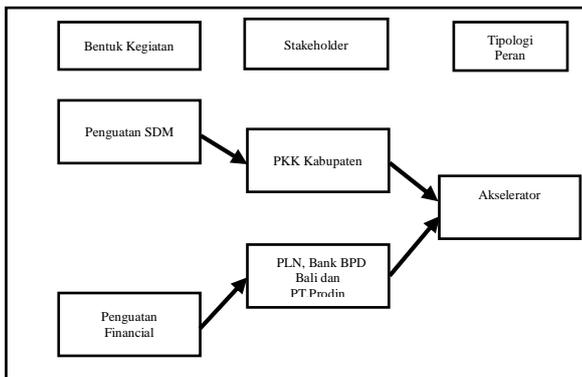
Peran Implementor pada Program Puspa Aman di Kabupaten Gianyar terdapat 3 (tiga) *stakeholder* yakni pemerintah desa, Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat desa dan Klompok Wanita Tani (KWT) tingkat Desa. Implementor yaitu *Stakeholders* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran(R. Nugroho, 2008). Adapun peran pembentukan rumah bibit, rumah pupuk di implementasikan oleh ke 3 (tiga) *Stakeholder* Pemerintah Desa, Penggerak Pemeberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Desa dan Klompok Wanita Tani (KWT) tingkat Desa, sedangkan dalam pengelolaan, distribusi dan produksi di implementasikan oleh Penggerak Pemberdayaan Kesajahteraan Keluarga (PKK) dan Klompok Wanita Tani (KWT). Adapun dalam pelaksanaan pengelolaan Puspa Aman dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang sudah disediakan

pemerintah Desa, sedangkan dalam distribusi dilaksanakan dengan pembentukan Klompok Wanita Tani ditingkat RT, dan melibatkan Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Desa.

5. Akselerator

Stakeholder yang berperan dalam Akselerator realisasi program Puspa Aman dapat digambarkan sebagai berikut:

Peran *Stakeholder* sebagai Akselerator

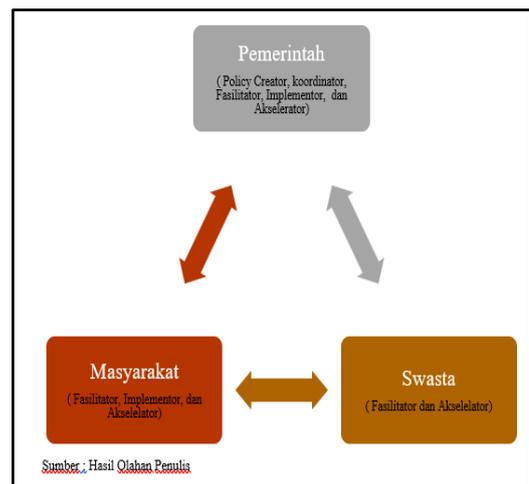


Sumber: Hasil Olahan Penulis.

Terdapat 2 (dua) *stakeholder* memiliki peran sebagai Akselerator dalam realisasi program Puspa Aman di kabupaten Gianyar, Akselerator yaitu *stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya (R. Nugroho, 2008). Akselerasi yang dilaksanakan penggerak pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Gianyar dalam penguatan SDM antara lain, sinergitas program pengolahan sampah berbasis sumber (TPS 3R) yang berbasis pada keluarga dengan program Puspa Aman dengan diadakannya pelatihan pemilihan dan pengolahan sampah yang berpotensi untuk menjadi pupuk. Selain itu diadakannya pelatihan pengolahan hasil panen menjadi produk jadi seperti bon cabe, saus tomat dan produk olahan lainnya. Adapun akselerasi dalam penguatan financial diperankan oleh perusahaan PLN cabang Gianyar, Bank BPD Bali Cabang Gianyar dan PT. Prodin melalui penyaluran *Corporate social responsibility* (CSR). Adapun dengan adanya *stakeholder* yang berperan sebagai Akselerator ikut mempercepat berjalannya program, hal ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah keterlaksanaan program Puspa Aman, pada 2020

terlaksana di 3 desa, pada 2021 terlaksana 32 desa dan 2022 pada triwulan II terlaksana 10 desa.

Berdasarkan uraian diatas diketahui dalam realisasi Program Puspa Aman di Kabupaten Gianyar, terdapat 3 (tiga) unsur *Stakeholder* yang terlibat yaitu unsur Pemerintah (*Government*), unsur Masyarakat (*Community*) dan unsur Swasta (*Busniss*). Dimana ketiga unsur tersebut mempunyai peran dan fungsinya masing-masing sehingga apabila digabungkan dalam sinergitas dengan tujuan tertentu maka akan memperoleh hasil yang optimal. Masing-masing *stakeholder* memiliki pengaruh yang strategis dalam pelaksanaan program (Paristha et al., 2022).



Tentu dari kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing *stakeholder*, dimungkinkan melakukan kerja sama dan sinergitas untuk mempercepat realisasi program Puspa Aman di kabupaten Gianyar. Dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 disektor ketahanan pangan dengan merealisasikan Program Puspa Aman di kabupaten Gianyar diketahui model kerja sama *stakeholder* sebagai berikut:

Dalam Model kerja sama *stakeholder* dalam realisasi program Puspa Aman di kabupaten Gianyar memperlihatkan *stakeholder* dari unsur pemerintah memiliki peran sentral, sehingga pemerintah memiliki peran sebagai *policy creator, koordinator, fasilitator, Implementor dan Akselerator* secara bersamaan, hal ini terjadi karena unsur-unsur dari pemerintah memiliki kepentingan yang sama dan terjadinya sinergitas dalam merealisasikan Program Puspa Aman. hal ini bisa dilihat keterlibatan pemerintah dalam pembuatan kebijakan dengan diterbitkannya Surat Edaran, selain itu pemerintah

melakukan pengkoordinasian program melalui sosialisasi Surat Edaran dan BIMTEK terkait realisasi program, pemberian fasilitas lahan pemerintah dan fasilitas financial melalui pengalokasian 20% APBdes. Peran pemerintah sebagai implementor program Puspa Aman yakni keterlibatan pemerintah dalam pembentukan rumah pupuk dan rumah bibit, hal ini diperkuat dengan akselerasi yang dilakukan pemerintah melalui pelatihan dan sinergitas program TPS 3R guna mendukung sektor rumah tangga dalam pemilahan, pengolahan dan pemanfaatan sampah salah satunya sebagai bahan pembuatan pupuk.

Berdasarkan skema model tersebut, *Stakeholder* dari unsur masyarakat memiliki peran strategis dalam realisasi program Puspa Aman, unsur masyarakat memiliki peran sebagai *Fasilitator, Implementor dan Akselelator*. selain itu masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dari pelaksanaan program tersebut, unsur masyarakat memiliki peran sebagai penggerak utama dalam keterlibatan sebagai fasilitator lahan, pengelolaan rumah bibit, rumah pupuk, perawatan dan pengolahan serta distribusi melalui komunitas Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Desa dan Klompok Wanita Tani. Selain itu dalam skema model tersebut *stakeholder* dari unsur Swasta memiliki peran sebagai *akselelator* untuk mempercepat dalam merealisasikan program Puspa Aman, hal ini ditunjukkan dengan adanya penguatan dan fasilitasi financial melalui *Corporate social responsibility* (CSR) turut serta dalam percepatan realisasi program Puspa Aman.

Berkaitan dengan model tersebut, realisasi program Puspa Aman di kabupaten Gianyar belum ada keterlibatan *stakeholder* dari unsur akdemis. Peran *stakeholder* dari unsur akademis yakni sebagai konseptor untuk mengkaji kebijakan secara komprehensif terkait pengembangan dan inovasi melalui berbagai riset dan development (Paristha et al., 2022). dimana *stakeholder* dari unsur Akademis dapat berperan sebagai akselerator dalam penguatan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan peningkatan produktifitas realisasi program Puspa Aman di Kabupaten Gianyar.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, diketahui realisasi Program Puspa Aman sudah terlaksana 70% dari total 65 Desa yakni 45 Desa di kabupaten Gianyar. Realisasi program Puspa Aman terdapat 3

(tiga) unsur stakeholder yang terlibat yakni unsur Pemerintah (*Government*), unsur Masyarakat (*Community*) dan unsur Swasta (*Busniss*), dan terdapat 16 (enam belas) stakeholder yang terlibat, Seluruh Unsur tersebut memiliki keterkaitan dalam merealisasikan Program. Unsur pemerintah memiliki peran sentral yakni berperan sebagai policy creator, koordinator, fasilitator, Implementor dan Akselerator secara bersamaan. Unsur masyarakat memiliki peran strategis yakni sebagai fasilitator, Implementor dan Akselerator. Adapun unsur Swasta memiliki peran sebagai Akselerator dengan adanya dukungan dari swasta, baik dari penguatan Sumber Daya Manusia dan Penguatan financial. Namun dalam realisasi program Puspa Aman belum ada keterlibatan unsur akademisi, dimana akademisi sebagai bagian stakeholder dapat terlibat dalam pengembangan dan inovasi program Puspa Aman melalui riset dan penguatan serta pengembangan sumber daya manusia dalam realisasi program Puspa Aman.

REFERENCES

- Ainanur, A., & Tirtayasa, S. (2018). *Pengaruh Badan Ketahanan Pangan*. (2020). *Indeks Ketahanan Pangan 2021*. In *Badan Ketahanan Pangan (Vol. 0, Issue 0)*. Kementerian Pertanian RI.
- Creswell, J. (2013). *Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. In *Research design*.
- Febriandini, A. P., Warsono, H., Azlansyah, S. S., & Sipayung, A. Z. (2019). PERAN *STAKEHOLDER DALAM PEMBERDAYAAN DI KAMPUNG PELANGI*. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 5(1). <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v5i1.47>
- Hijri, Y. S., Kamil, M., Sadewo, B., & Sihidi, I. T. (2021). *Network Governance Dalam Pemenuhan Ketersediaan Pangan Di Kota Malang*. *Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM*, 7(2).
- <https://www.cnbcindonesia.com/news>. (2021). *Meledak 381%, Indonesia Masuk Puncak Kedua Wabah Covid-19*. <https://www.Cnbcindonesia.Com/News/20210630114240-4-257019/Meledak-381-Indonesia-Masuk-Puncak-Kedua-Wabah-Covid-19>.

- K. Yin, R. (2003). *Applications of case study research. In Applied Social Research Methods Series (Vol. 34).*
- Krisnadi, A. (2012). *Partisipasi Stakeholders dalam Capaian Program Desa Mandiri Pangan di Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA, 8(3).* <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i3.6483>
- Kristina, N. M. rai. (2020). *Pemulihan Ekonomi Pariwisata Bali di Era New Normal. Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu, 2(1).*
- Listyo, M., Soekmadi, R., & Susilo, H. (2018). *Analysis of Stakeholders in Betung Kerihun National Park's Ecosystem Development, Kapuas Hulu District. 8(1), 55–61.* <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.55-61>
- Mariana, D. (2010). *Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1), 13–20.*
- Mustafa, F., & Marsoyo, A. (2020). *Tipologi Peran Stakeholder dalam Mendukung Reforestasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Planoearth, 5(1), 35.* <https://doi.org/10.31764/jpe.v5i1.1653>
- Neuman, W. L. (2011). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In Pearson Education.*
- Nugroho, D. R., Soeprapto, F. A., Alfissa, N. Y. L., & Soraya, A. I. (2020). *Dampak Covid 19 pada Ekonomi: Pendekatan Strategi Ketahanan Pangan. In Google Books.*
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan. In Jakarta: Elex Media Komputindo.*
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy , Dinamika Kebijakan Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik. PT Elex Media Komputindo.*
- Paristha, N. P. T., Arida, I. N. S., & Bhaskara, G. I. (2022). *Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA).* <https://doi.org/10.24843/jumpa.2022.v08.i02.p13>
- Puspaningtyas, A. (2021). *Optimalisasi sektor unggulan Kota Surabaya dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 19-32.*
- Rakhmadany, A., Tahsinurridlo, M., Fauziyah, L., Rahmawati, N. A., & Aidah, S. (2020). *Stakeholder Analysis Program Jaminan Pangan Masyarakat (JAPANGMAS) oleh PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu. EMPOWER : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 5(1), 1–24.* <http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/empower>
- Saputri, A. Y. (2019). *Analisis Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik Kota Semarang (Studi Kasus : Kampung Tematik Jajan Pasar, Kelurahan Gajahmungkur). Journal of Politic and Government Studies, 8(04), 201–210.*

